



Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa Wisata Pandansari di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang

Community Participation in the Empowerment Program of Pandansari Tourism Village in Warungasem District, Batang Regency

Muhammad Imam Baihaqi^{1*}, Amin Yusuf²

¹⁻² Universitas Negeri Semarang, Indonesia

mbaihaqi315@students.unnes.ac.id¹, amin.yusuf@mail.unnes.ac.id²

*Penulis Korespondensi: mbaihaqi315@students.unnes.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 11 Oktober, 2025;
Revisi: 21 Oktober, 2025;
Diterima: 19 November, 2025;
Tersedia: 31 Desember, 2025;
Terbit: 03 Januari, 2026;

Keywords: Community Participation; Ecotourism; Empowerment; Tourism; Tourism Village.

Abstract. The phenomenon of community participation in rural tourism empowerment programs in Indonesia shows disparities, where participation is often limited to certain groups. Meanwhile, vulnerable groups such as farmers and women are often less involved, which of course hinders the sustainability of village development. This research aims to analyze the level and form of community participation in the Pandansari Tourism Village Empowerment Program, as well as to identify supporting and hindering factors. Using a qualitative approach with a case study design, data was then obtained thru in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The research findings revealed that participation was strongest during the implementation phase but weak during the planning and evaluation phases, with supporting factors such as local leadership and institutional support. However, barriers included limited access to information and social capital. The novelty of the research lies in the integration of Arnstein's Ladder framework with the Sustainable Livelihood Framework to examine the dynamics of participation in the context of coastal-agrarian tourist villages and provide in-depth insights into power relations and local livelihood strategies.

Abstrak.

Fenomena partisipasi masyarakat pada program pemberdayaan desa wisata di Indonesia menunjukkan ketimpangan, dimana partisipasi sering kali hanya terbatas pada kelompok tertentu. Sementara kelompok rentan seperti petani dan perempuan kerap kurang terlibat, dan tentu saja menghambat keberlanjutan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa Wisata Pandansari, serta mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, kemudian data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi paling kuat pada tahap pelaksanaan tetapi lemah pada tahap perencanaan dan evaluasi, dengan faktor pendukung seperti kepemimpinan lokal serta dukungan kelembagaan, adapun penghambat berupa keterbatasan akses informasi dan modal sosial. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi kerangka Arnstein's Ladder dengan Sustainable Livelihood Framework untuk mengkaji dinamika partisipasi pada konteks desa wisata pesisir-agraris dan memberikan wawasan mendalam tentang relasi kekuasaan dan strategi nafkah lokal.

Kata kunci: Desa Wisata; Ekowisata; Pariwisata; Partisipasi Masyarakat; Pemberdayaan.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu cara utama untuk mempercepat pemulihan ekonomi di seluruh dunia setelah pandemi COVID-19 adalah dengan membangun pariwisata yang berkelanjutan, terutama di daerah pedesaan yang lebih mudah terkena dampaknya. Sebuah laporan dari organisasi pariwisata global menunjukkan bahwa arus wisatawan telah pulih sejak tahun 2023, dengan wisatawan memprioritaskan destinasi alam, pengalaman pribadi, dan komunitas lokal (World

Tourism Organization, 2023). Penguatan desa wisata sebagai pusat ekonomi pedesaan dan tempat pelestarian budaya dan lingkungan adalah tujuan yang sejalan dengan tren ini di Indonesia. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional meningkat dari 2,4% pada 2021 menjadi sekitar 4% pada 2024, menunjukkan peran utama sektor pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kemenparekraf, 2024).

Peningkatan jumlah desa wisata di Indonesia yang meningkat dari 3.613 pada 2022 menjadi lebih dari 6.000 pada 2024 belum sepenuhnya diimbangi oleh tingkat manajemen dan partisipasi masyarakat yang baik. Banyak desa wisata menghadapi masalah seperti keterbatasan akses informasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan partisipasi simbolik yang rendah, yang dapat menyebabkan perbedaan sosial-ekonomi menjadi lebih besar (Muda, 2025). Komunitas-berbasis pariwisata (CBT) adalah pendekatan penting untuk menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan manfaat pariwisata untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mempertahankan kelestarian sosial-budaya dan lingkungan (Hariyadi et al., 2024; Widayati et al., 2024).

Studi empiris menunjukkan bahwa keberhasilan CBT bergantung pada partisipasi inklusif, di mana komunitas memiliki kesempatan untuk membuat keputusan (Suyatna et al., 2024). Namun, partisipasi seringkali terbatas pada tingkat simbolik, dengan manfaat yang timpang diberikan dan keterlibatan terbatas pada kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda yang minim (Muda, 2025). Pemanfaatan teknologi di era digitalisasi memungkinkan promosi dan pengelolaan; namun, tanpa pemberdayaan kapasitas, ketimpangan dapat meningkat (Budisusila & Handoko, 2023; Kusumastuti et al., 2023).

Untuk menganalisis hubungan kekuasaan dalam program desa wisata, teori Arnstein Ladder of Citizen Participation (1969) digunakan. Studi terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa banyak desa wisata tetap pada tingkat "informasi" atau "konsultasi" daripada "kolaborasi" (Ginting, 2024; Hardiani et al., 2021; Rochman et al., 2022). Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 8 (pekerjaan layak) dan Goal 11 (komunitas berkelanjutan) ditekankan dalam swakelola desa serta pemanfaatan sumber daya lokal yang diatur dalam kebijakan nasional seperti Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023.

Desa Wisata Pandansari berada di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah merupakan kasus representatif. Desa ini memiliki luas 1.200 hektar, populasi sekitar 5.000 orang, dan memiliki mayoritas mata pencaharian pertanian dan pekerjaan informal. Ada potensi alam seperti sungai jernih dan kerajinan pandan. Kunjungan wisatawan telah meningkat setelah pandemi, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah hanya sekitar sepertiga warga yang aktif (Prayudhi et al., 2024; Salim, 2025). Hal ini disebabkan oleh

masalah seperti kehilangan lahan, beban kerja ganda perempuan, dan ketimpangan gender dan generasi (Prayudhi et al., 2024).

Pola ini menunjukkan partisipasi lebih kuat pada pelaksanaan daripada perencanaan yang menunjukkan bahwa dinamika partisipasi perlu dianalisis secara menyeluruh. Analisis partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa Wisata Pandansari di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa wisata. Secara khusus, tujuan penelitian adalah sebagai berikut: (a) menjelaskan tingkat dan jenis partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan; dan (b) menemukan faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi partisipasi masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah proses keterlibatan aktif dan sukarela kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif (Widodo & Setiawan, 2020). Dalam konteks pemberdayaan desa wisata, partisipasi ini berfungsi sebagai pemberdayaan, di mana masyarakat berperan sebagai subjek utama dalam mengelola sumber daya lokal, selaras dengan prinsip pemberdayaan berbasis masyarakat (Sari et al., 2021). Definisi ini menekankan aspek transformasional, yang mencakup peningkatan kemampuan individu dan komunitas untuk mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang tidak berpengaruh.

Konsep Community-Based Tourism (CBT) menempatkan partisipasi masyarakat sebagai poros utama dalam proses pengembangan model pariwisata. Masyarakat desa berperan sebagai aktor kunci karena mereka merupakan pihak yang paling memahami karakteristik, potensi, serta dinamika sosial budaya destinasi atau calon destinasi yang akan dikembangkan (Suhaimi et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Widaningsih et al. (2024) menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa memiliki kontribusi signifikan dalam memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi dan pendidikan secara lebih merata.

Upaya ini juga berimplikasi pada berkurangnya kesenjangan sosial di tingkat lokal melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial yang lebih inklusif. Selanjutnya, pengembangan pariwisata berbasis komunitas diharapkan mampu berperan sebagai katalisator bagi proses pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan peluang ekonomi, antara lain pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja yang inklusif, serta perluasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan di sektor pariwisata (Raharjo & Wirahayu, 2025).

Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu fenomena global yang tengah mengalami perkembangan pesat di berbagai wilayah. Tren ini terjadi karena industri pariwisata relatif tidak menimbulkan dampak polusi yang signifikan terhadap lingkungan, sehingga dianggap sebagai sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Secara konseptual, pariwisata mencakup seluruh rangkaian aktivitas manusia yang dilakukan secara individu maupun berkelompok di suatu wilayah, yang didukung oleh berbagai fasilitas, jasa, serta faktor pendukung lainnya yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan (Lutuhrean, 2019).

Dalam perspektif pariwisata modern konsep ini telah berevolusi menjadi suatu industri yang menekankan aspek komersial dan profesional melalui penyediaan produk-produk pariwisata berbasis bisnis modern. Hal ini mencakup pengelolaan destinasi, penyediaan layanan transportasi, akomodasi, pengembangan ekonomi kreatif, serta penyelenggaraan atraksi seni dan budaya dalam bentuk paket wisata yang menarik. Seluruh elemen tersebut dirancang untuk menciptakan pengalaman berwisata yang lebih berkesan dan memberikan kepuasan maksimal bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi tertentu (Ohorella & Prihantoro, 2021).

Desa Wisata

Pariwisata pedesaan dapat dipahami sebagai suatu bentuk pemukiman yang menyediakan lingkungan dengan fasilitas pendukung bagi wisatawan untuk menikmati, memahami, dan mengapresiasi keunikan serta karakteristik khas kehidupan masyarakat desa beserta seluruh daya tarik yang dimilikinya (Hidayat et al., 2022). Menurut Annisya et al. (2023), aktivitas pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga memiliki tujuan strategis dalam mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan melalui pengelolaan potensi wisata yang berbasis pada kearifan lokal. Gaya hidup dan kualitas hidup masyarakat lokal menjadi komponen utama yang membentuk identitas dan karakter suatu desa wisata. Kondisi ekonomi, fisik, dan sosial wilayah pedesaan, termasuk warisan budaya, aktivitas pertanian, bentang alam, jasa pelayanan, potensi wisata sejarah dan budaya, serta pengalaman unik dan autentik khas daerah, berperan penting dalam menjaga keaslian (*authenticity*) dan daya tarik dari suatu destinasi desa wisata.

Program pemberdayaan desa wisata adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa melalui pengembangan pariwisata yang berfokus pada potensi lokal dan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang menekankan pendekatan partisipasi untuk keberlanjutan pariwisata, mendukung program ini di Indonesia. Dapat dikatakan wisata merupakan salah satu cara masyarakat berkembang dari ketergantungan menjadi kemandirian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan Desa Wisata Pandansari di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, persepsi, serta dinamika interaksi sosial dari perspektif partisipan sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014). Desain studi kasus memungkinkan peneliti memfokuskan analisis pada konteks spesifik desa wisata yang sejak 2018 telah menjalankan program pemberdayaan berbasis masyarakat. Data dikumpulkan di lokasi penelitian selama tiga bulan (Oktober–November 2025), dengan memanfaatkan karakteristik Desa Pandansari sebagai desa wisata yang memadukan potensi alam, budaya, dan ekonomi lokal. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara dengan tujuh informan kunci, observasi kegiatan pemberdayaan, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas desa wisata serta data sekunder berupa laporan resmi, arsip desa, dan literatur terkait, yang keseluruhannya digunakan untuk meningkatkan validitas melalui triangulasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode, yaitu wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipan, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan selama 45–60 menit dengan pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi pengalaman partisipan, sementara observasi dilakukan dalam kegiatan seperti rapat pokdarwis dan pelatihan pemberdayaan untuk memahami perilaku partisipasi secara natural. Dokumen program dianalisis sebagai pelengkap data primer. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014), dimulai dari reduksi data dengan pengkodean tematik berbantuan NVivo, penyajian data melalui matriks dan narasi deskriptif, hingga penarikan kesimpulan secara induktif dengan merujuk pada teori partisipasi Arnstein (1969). Proses analisis dilakukan secara iteratif, di mana temuan sementara memengaruhi pengumpulan data berikutnya, sehingga memastikan keluasan, kedalaman, serta koherensi hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa Wisata Pandansari di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kurang terlibat dalam Program Pemberdayaan Desa Wisata Pandansari. Kelompok-kelompok tertentu yang bertanggung jawab atas pengelolaan desa wisata, seperti pengurus komunitas dan pokdarwis (Kopal Etom dan Pokdarwis Pandansari), serta kelompok warga yang terhubung dengan bisnis wisata, seperti pemilik toko, penyewa ban, juru parkir, dan karyawan yang mengelola tubing dan outbound. Di luar kelompok tersebut, sebagian besar warga cenderung lebih terlibat sebagai penonton daripada pelaku aktif. Ini terutama berlaku untuk penduduk yang tinggal di dusun yang jauh dari titik wisata, petani yang berkonsentrasi pada pertanian, dan individu yang tidak bergabung dalam kelompok usaha.

Menurut kepala desa, dampak dan keterlibatan desa wisata paling kuat berada di sekitar RT 1 dan RT 4, yang merupakan lokasi basecamp dan aktivitas wisata sungai. Orang-orang yang tinggal di daerah ini lebih banyak tertarik pada industri wisata, baik melalui pekerjaan pendamping tubing sehari-hari maupun usaha kecil-kecilan. Tingkat partisipasi tidak sekuat di wilayah desa lainnya. Keterlibatan warga biasa relatif lebih terbatas pada tahap perencanaan dan evaluasi, tetapi partisipasi tertinggi terlihat saat kegiatan wisata dijalankan. Dengan kata lain, warga sering terlibat sebagai pelaksana dan penyedia tenaga atau jasa, tetapi mereka belum sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Ketua komunitas, pokdarwis, dan pendamping program memberikan informasi terus menerus selama tahap perencanaan.

Inisiatif awal untuk membangun desa wisata Pandansari berasal dari komunitas pecinta alam yang dipimpin oleh tokoh lokal. Sekitar tahun 2013, mereka melakukan pemetaan swadaya untuk menemukan peluang dan masalah desa. Mereka menemukan air irigasi yang melimpah sepanjang tahun, peluang budidaya ikan, peluang susur sungai (*body rafting* atau *river tubing*), pasar desa yang belum ideal, dan ide sawah organik sebagai daya tarik. Sekitar tahun 2015, hasil pemetaan dipresentasikan pada forum desa yang dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat, lembaga desa, dan pemuda. "Siapa yang berminat mengelola sawah organik?" "Siapa yang berminat dalam perikanan?" dan "Siapa yang tertarik memanfaatkan saluran air untuk wisata?". Adalah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh ketua komunitas di forum tersebut. Ini secara formal menunjukkan adanya upaya untuk mendorong warga untuk berpartisipasi dalam proses awal melalui musyawarah desa. Namun, perspektif orang biasa berbeda.

Dua penerima manfaat yang diwawancara, seorang pemuda yang pernah menjadi anggota dan seorang ibu penjual bakso, mengatakan mereka baru mengetahui adanya desa wisata sekitar tahun 2017. Mereka tidak merasa terlibat secara langsung dalam proses perencanaan konsep desa wisata, tetapi lebih banyak datang sebagai pekerja atau pelaku bisnis setelah desa wisata mulai ramai. Selain itu, pendamping program menyatakan bahwa komunikasi dengan masyarakat luas belum sempurna. Ketika informasi datang ke masyarakat "biasa", terutama mereka yang tidak tergabung dalam komunitas atau kelompok inti, cenderung bertindak sebagai penerima daripada sebagai pengarah program. Perumusan gagasan desa wisata dan kehidupan sehari-hari warga ditandai dengan komentar seperti "sekadar melihat" atau "bodo amat".

Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan: (1) Komunitas pengagas dan pokdarwis terlibat dengan tingkat partisipasi yang relatif tinggi dalam pemetaan potensi, presentasi ide, dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten; (2) Orang biasa lebih banyak berperan sebagai penerima informasi daripada penentu jalan; (3) Pemerintah desa hadir dalam forum formal, tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam memfasilitasi diskusi perencanaan. Jadi, pada tahap perencanaan, lingkar inti komunitas dapat menganggap tingkat partisipasi masyarakat tinggi, tetapi masyarakat luas cenderung pasif. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat terlihat paling jelas. Kegiatan operasional desa wisata, khususnya wisata tubing, outbound, dan layanan bagi pengunjung, melibatkan beberapa lapisan masyarakat dengan intensitas yang berbeda-beda, menurut data wawancara dan observasi.

Anggota komunitas dan pokdarwis serta pengelola inti memiliki tingkat partisipasi tertinggi. Ketua komunitas mengatakan bahwa ada struktur kerja yang jelas. Staf manajemen, asisten manajemen, sopir/driver, fasilitator outbound, petugas guide tubing, dan lainnya termasuk dalam struktur ini. Setiap hari atau setiap kunjungan, mereka bertanggung jawab untuk menyiapkan alat, mengatur jadwal, mendampingi pengunjung di sungai, dan mengelola transaksi dan komunikasi dengan pihak luar. Selain itu, ketua komunitas menegaskan bahwa anggota baru menerima pendampingan dan pelatihan internal. Calon fasilitator outbound menjalani "magang" selama sekitar tiga bulan untuk praktik di lapangan; calon guide tubing pergi ke air selama kurang lebih satu bulan sebelum diizinkan untuk melayani tamu secara mandiri. Proses internal ini menunjukkan bahwa kelompok inti benar-benar menjalankan peran sebagai pelaksana utama dan pengelola operasional, meskipun pelatihan bersertifikat dari luar sekarang jarang dilakukan.

Selain itu, kelompok usaha lokal terafiliasi (toko, KUBE, dan jasa pendukung) menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Salah satu sumber wanita mengatakan bahwa ia telah bergabung dalam KUBE, sebuah organisasi yang mengelola kedai bakso di daerah wisata. Anggota mendapatkan modal awal untuk bisnis mereka, menerima pembayaran bulanan, dan juga mengikuti pertemuan rutin sebulan sekali. Menurut anggota muda sebelumnya, warga sekitar sempat diberi bantuan gerobak dan model bisnis pada awal perintisan, memungkinkan mereka untuk mulai berjualan di area wisata. Seiring waktu, beberapa bisnis bertahan, tetapi yang lain berhenti karena keterbatasan modal, persaingan, dan pola pengelolaan basecamp yang berubah. Saat ini, banyak bisnis yang paling menonjol di area inti memiliki hubungan langsung dengan pengelola, sementara toko milik warga lain lebih banyak berada di luar area inti.

Selain itu, masyarakat terlibat secara tidak langsung dalam masalah ini, seperti menyewakan lahan parkir atau membuka warung di sepanjang jalan menuju lokasi wisata. Kelompok ini memiliki tingkat partisipasi yang relatif sedang. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam struktur pengelola atau rapat internal pokdarwis, mereka tetap menghasilkan uang dan berkontribusi pada suasana desa wisata. Orang-orang yang tinggal di desa namun berada di luar kawasan wisata, terutama mereka yang berkonsentrasi pada pertanian dan pekerjaan sehari-hari, tampaknya kurang terlibat dalam menjalankan kegiatan desa wisata. Beberapa dari mereka hanya mengetahui tentang gerakan wisata, tetapi tidak pernah terlibat secara langsung dalam bisnis atau pelaksanaannya. Menurut pendamping dan beberapa narasumber, kelompok ini lebih cenderung melihat wisata sebagai "urusian sebagian orang" di sekitar sungai daripada sebagai masalah desa secara keseluruhan. Pola tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa tingkat partisipasi masyarakat bervariasi pada tahap pelaksanaan, sangat tinggi untuk pengelola inti dan kelompok usaha terafiliasi, sangat menengah untuk warga sekitar yang memanfaatkan peluang usaha, dan sangat rendah untuk warga di luar kawasan wisata.

Pertemuan berkala, rapat kelompok, dan evaluasi operasional merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi program pemberdayaan desa wisata. Hasil wawancara dapat menunjukkan beberapa jenis forum: (1) Pertemuan Pokdarwis/Komunitas, yang diadakan setidaknya dua kali setahun, di mana anggota kelompok sadar wisata berkumpul untuk mengulang prinsip-prinsip "sapta pesona", menyamakan persepsi tentang standar pelayanan, dan membahas masalah teknis; (2) Rapat KUBE dan Kelompok Usaha, yang diadakan sebulan sekali untuk membahas masalah praktis, penjualan, dan pembagian hasil; dan (3) Evaluasi internal grup. Namun, kurangnya partisipasi warga umum dalam pengawasan menunjukkan

bahwa proses evaluasi masih sangat internal dan belum berkembang menjadi mekanisme pengawasan bersama di tingkat desa. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar kelompok.

Sebagai motor utama, komunitas pengagas dan pengurus pokdarwis memiliki tingkat partisipasi tertinggi pada seluruh tahapan. Meskipun terbatas pada perencanaan strategis, kelompok usaha lokal terafiliasi sangat terlibat dalam aspek pelaksanaan dan ekonomi. Pemuda desa terlibat aktif dalam pelaksanaan dan fasilitasi, tetapi tidak selalu dalam perencanaan kebijakan. Meskipun tidak banyak dibahas di forum evaluasi, perempuan pelaku usaha kecil terlibat aktif dalam bisnis kuliner. Petani dan buruh harian di daerah luar kawasan wisata tidak terlalu terlibat; mereka masih berkonsentrasi pada pekerjaan pokok. Pemerintah desa hadir di forum formal, tetapi peran mereka sebagai penggerak partisipasi tidak kuat. Variasi ini menunjukkan partisipasi masyarakat yang tidak seragam karena dipengaruhi oleh posisi sosial, hubungan dengan pengelola inti, kedekatan dengan pusat rekreasi, dan akses modal.

Menurut sintesis tingkat partisipasi, lingkar inti pengelola memiliki tingkat partisipasi tertinggi, sementara warga lainnya memiliki tingkat partisipasi rendah. Desa wisata memiliki tingkat partisipasi yang paling tinggi dalam pelaksanaan, tetapi lebih sedikit dalam perencanaan dan pengawasan. Kekurangan sosial dan geografis tercermin dalam pandangan warga bahwa desa wisata lebih seperti "bisnis pribadi" sejumlah pihak.

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa Wisata Pandansari di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang

Bentuk partisipasi masyarakat pada program desa wisata Pandansari akan dijelaskan pada tiga tahap utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, masing-masing kelompok dapat menunjukkan bagaimana partisipasi mereka berbeda. Sekitar tahun 2013, komunitas pengagas dan pengurus pokdarwis melakukan pemetaan swadaya untuk mengidentifikasi sumber daya desa seperti aliran irigasi, peluang budidaya ikan, potensi sungai untuk tubing, lahan sawah organik, dan pasar desa. Hasil pemetaan kemudian dipaparkan pada forum desa yang melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, lembaga desa, dan pemuda untuk mendorong warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.

Dengan hadir dalam forum resmi, memberikan legitimasi administratif, dan memfasilitasi pengajuan program ke tingkat kabupaten, pemerintah desa menunjukkan partisipasi mendukung namun belum proaktif dalam meningkatkan keterlibatan. Namun, dari sudut pandang warga biasa, belum ada musyawarah lanjutan yang dimaksudkan untuk

memperluas partisipasi hingga RT atau dusun jauh. Ini berarti bahwa setelah fasilitas dibangun, warga umum baru akan mengetahui program. Orang-orang biasa dan penerima manfaat, seperti anak-anak muda yang pernah menjadi anggota dan ibu penjual bakso, menunjukkan partisipasi pasif-informasional, yaitu mereka mengetahui tentang desa wisata melalui cerita atau sosialisasi singkat, tanpa terlibat dalam pembentukan ide awal.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap implementasi program dan operasional wisata, partisipasi masyarakat tampak lebih beragam dan mudah dilihat, dengan elemen aktif dan bekerja sama yang lebih jelas terlihat, terutama di sekitar pusat aktivitas wisata. Pengurus pokdarwis/komunitas berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan, dengan struktur kerja internal yang terdiri dari staf administrasi, sopir, fasilitator outbound, petugas guide tubing, dan penanggung jawab peralatan, yang mengatur jadwal, bernegosiasi dengan pengunjung, dan bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan.

Melalui proses pelatihan internal yang bertahap dari observasi hingga penanganan tamu langsung, pemuda lokal sebagai kru menunjukkan partisipasi aktif dalam operasional. Mereka berperan sebagai pemandu tubing, kru outbound, tenaga pengangkut, dan sopir. Meskipun beberapa warga memiliki keterbatasan ruang dan modal, kelompok usaha lokal seperti warung dan KUBE menunjukkan partisipasi aktif-ekonomis dengan mengelola kedai, memberikan layanan kepada pembeli, dan mengadakan pertemuan rutin bulanan untuk membahas omset dan pembagian hasil.

Di luar lingkar inti, masyarakat menunjukkan partisipasi pasif sebagai penonton, mengetahui kegiatan wisata tetapi tidak terlibat langsung karena jarak, beban kerja pertanian, keterbatasan modal, atau persepsi bahwa wisata adalah masalah kelompok tertentu. Di lapangan, beberapa bentuk kerja sama terbatas muncul, seperti bekerja sama dengan juru parkir atau menyesuaikan jam buka warung, tetapi masih terbatas pada orang yang benar-benar bekerja.

Tahap Evaluasi

Evaluasi dan pengawasan sering kali menunjukkan seberapa jauh partisipasi telah berkembang dari sekadar terlibat dalam kegiatan ke arah ikut menentukan dan mengawasi program. Pada saat ini, partisipasi di Desa Wisata Pandansari tampaknya masih cukup terbatas dan biasanya terbatas pada pengelola dan kelompok usaha. Evaluasi internal pokdarwis dan pelaku wisata menunjukkan bahwa mereka terlibat secara aktif tetapi tertutup; mereka berkumpul secara berkala untuk membahas prinsip pelayanan, kendala lapangan, dan rencana

perbaikan. Namun, evaluasi ini hanya melibatkan pelaku yang sudah terintegrasi dalam struktur pengelola.

Rapat rutin KUBE dan kelompok usaha menunjukkan partisipasi aktif di skala mikro. Ada agenda untuk membahas masalah teknis, penjualan, dan pembagian hasil, di mana anggota dapat memberikan saran, tetapi hanya untuk anggota kelompok. Evaluasi operasional kru dan pemandu menunjukkan partisipasi aktif dan dinamika relasi, dengan forum dua minggu sekali untuk membahas jadwal dan teknis kerja. Sedangkan orang umum hampir tidak terlibat dalam pengawasan formal karena tidak ada forum evaluasi terbuka di tingkat desa yang memungkinkan orang menilai, bertanya, atau mengkritik program. Akibatnya, mereka hanya terlibat sebagai pengamat pasif pada tahap ini.

Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa Wisata Pandansari di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor penting yang saling terkait mendorong partisipasi masyarakat di Desa Wisata Pandansari. Faktor-faktor ini mencerminkan pendekatan pengembangan wisata berbasis komunitas (*Community-Based Tourism/CBT*). Faktor pertama yang paling menonjol adalah kepemimpinan dan inisiatif komunitas lokal, yang berasal dari kelompok Kopal Etom pecinta alam yang berdiri sejak akhir 1990-an. Pemetaan swadaya potensi desa seperti saluran irigasi dan lahan sawah dilakukan oleh komunitas ini. Mereka juga mempresentasikannya dalam forum desa untuk mendapatkan dukungan internal. Kepemimpinan ketua komunitas yang konsisten berfungsi sebagai referensi, memungkinkan orang-orang di daerah tersebut bertindak sebagai inisiator daripada hanya melakukan hal-hal secara pasif. Hal ini sejalan dengan penelitian CBT yang menekankan bahwa kepemimpinan lokal dengan jejaring, keterampilan, dan komitmen jangka panjang adalah kunci keberhasilan pengelolaan wisata berbasis komunitas.

Yang kedua, legitimasi dan dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah selain inisiatif internal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Usulan pengembangan wisata sungai di Pandansari bersaing dengan usulan lain dalam program "ikon kecamatan" pemerintah kabupaten. Usulan ini berhasil mendapatkan dana untuk infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan basecamp, dan pembelian peralatan tubing. Dengan dukungan ini, destinasi tidak hanya memiliki modal fisik yang lebih baik, tetapi juga menunjukkan bahwa pembangunan desa wisata adalah bagian penting dari kebijakan pembangunan daerah. Kehadiran fasilitas ini memberi masyarakat keyakinan akan prospek jangka menengah dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pekerjaan, usaha, atau kegiatan lainnya.

Faktor ketiga adalah daya tarik sumber daya alam dan peluang ekonomi tambahan yang terkait dengan modal sosial lokal. Dengan debit air yang stabil, saluran irigasi memungkinkan pengembangan aktivitas wisata seperti tubing sungai. Ini juga membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar, seperti pemandu, pengelola peralatan, penyedia transportasi, dan penjual makanan. Kedekatan dengan wilayah pemukiman memungkinkan partisipasi tanpa biaya tambahan, sejalan dengan kerangka kelangsungan hidup yang berkelanjutan (SLF), yang menekankan modal alam sebagai katalisator penghidupan baru. Modal sosial, seperti tradisi gotong royong, pertemuan rutin di kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan kelompok usaha bersama (KUBE), membantu koordinasi dan membagi tugas. Desa wisata dapat bertahan melalui tantangan seperti pandemi COVID-19 berkat nilai kebersamaan yang ada dalam budaya lokal.

Keempat, pengakuan dan penghargaan dari luar serta penggunaan media digital, memberikan dukungan psikologis dan promosi yang meningkatkan partisipasi pemuda. Desa Wisata Pandansari telah menumbuhkan rasa bangga dan legitimasi di kalangan warga setelah menerima penghargaan CSR Award dan Nusantara CSR Award di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Pengakuan ini mengubah pandangan masyarakat tentang desa wisata sebagai prestasi kolektif yang harus dipertahankan, mendorong partisipasi melalui kunjungan studi banding dan liputan media. Sementara itu, pengelola konten muda menggunakan media digital seperti TikTok, Instagram, dan Facebook untuk mendokumentasikan kegiatan dan testimoni, membuka ruang baru untuk partisipasi di era pascapandemi, meskipun belum melibatkan semua orang.

Secara keseluruhan, unsur-unsur pendukung ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Wisata Pandansari terus berlanjut melalui integrasi inisiatif lokal, dukungan kelembagaan, peluang ekonomi, modal sosial, pengakuan dari luar, dan inovasi digital. Metode ini menunjukkan bahwa teori CBT dan SLF relevan untuk pengembangan wisata pedesaan, di mana aktor lokal dapat mengelola sumber daya secara mandiri sambil menanggapi masalah dari luar. Hasil ini memberikan manfaat bagi kebijakan wisata berbasis komunitas di Indonesia, dengan menekankan betapa pentingnya kerja sama internal dan eksternal untuk keberlanjutan.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa Wisata Pandansari di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada faktor pendorong yang kuat, partisipasi masyarakat di Desa Wisata Pandansari tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada kelompok pengelola inti. Ini terjadi karena berbagai hambatan struktural, ekonomi, sosial-

budaya, kelembagaan, dan personal. Hambatan pertama yang signifikan adalah keterbatasan akses informasi dan keterbatasan proses komunikasi. Akibatnya, sosialisasi program desa wisata lebih sering terbatas pada komunitas pengagas, remaja, dan warga di sekitar lokasi utama seperti RT 1 dan RT 4. Orang-orang di dusun lain sering kali hanya memiliki tingkat kesadaran (awareness) dan tidak memiliki akses ke kanal yang jelas untuk terlibat lebih dalam. Akibatnya, partisipasi mereka hanya terbatas pada tingkat hanya tahu saja. Kondisi ini mengurangi partisipasi substantif karena kekurangan komunikasi menghalangi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, yang didefinisikan sebagai partisipasi demokratis.

Hambatan kedua adalah gagasan bahwa kelompok tertentu mengontrol ruang ekonomi dan privatisasinya, yang membuat warga merasa tidak adil. Pada awal pembangunan, orang-orang diminta untuk membantu dengan bantuan modal seperti gerobak. Namun, seiring waktu, bisnis strategis di basecamp sekarang dikelola langsung oleh pengelola inti, dengan aturan tidak tertulis yang melarang orang-orang menjual barang serupa. Ini menyebabkan persepsi bahwa desa wisata semakin menyerupai bisnis pribadi yang mendorong sebagian warga untuk menjauh dan membeli barang di luar pusat kota. Persepsi ini, yang sering muncul dalam studi tentang rekreasi berbasis komunitas (CBT), menjadi penghalang utama untuk terus berpartisipasi, terutama bagi kelompok yang merasa dipinggirkan. Akibatnya, ini meningkatkan ketimpangan sosial-ekonomi.

Selain itu, beban kerja harian dan keterbatasan modal finansial merupakan hambatan temporal dan ekonomi yang menghalangi partisipasi lebih luas. Meskipun ada beberapa skema bantuan, sebagian besar penduduk yang bergantung pada pertanian dan pekerjaan informal menghadapi kesulitan mendapatkan modal awal untuk memulai bisnis wisata. Rumah tangga dengan modal rendah dalam kerangka *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) cenderung menggunakan strategi nafkah defensif, memilih pekerjaan harian yang pasti daripada mengambil risiko membuka bisnis baru. Suara mereka jarang terdengar di tingkat perencanaan karena beban kerja harian, termasuk bagi perempuan yang memikul tanggung jawab rumah tangga, bertentangan dengan jadwal rapat atau pelatihan. Hambatan ini bukan hanya masalah minat, tetapi struktur nafkah rumah tangga yang sulit diubah dalam waktu singkat.

Hambatan sosial-budaya semakin kompleks karena dinamika relasi internal dan keterbatasan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan. Eks-anggota pengelola mengatakan mereka tidak ingin terlibat lagi karena mengantisipasi kritik atau gesekan sosial, seperti kebencian dan salah paham tentang perbedaan pendapatan. Hal ini menciptakan suasana hati yang tidak menyenangkan dan membatasi basis partisipasi pada orang-orang yang sudah aktif.

Karena norma sosial dan beban rumah tangga, perempuan yang aktif dalam bisnis tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Mereka yang rentan, seperti keluarga miskin atau penduduk dusun jauh, menghadapi tantangan serupa dan terus mempertahankan pola partisipasi yang tidak adil terhadap kelompok sosial-ekonomi yang lebih kuat.

Terakhir, hambatan kelembagaan seperti kurangnya pelatihan dan sertifikasi formal yang berkelanjutan, tingkat literasi digital yang rendah, dan kurangnya mekanisme penilaian terbuka semuanya menyebabkan partisipasi yang tidak seimbang. Pelatihan resmi telah berkurang, sehingga regenerasi bergantung pada magang internal yang tidak memberikan pengakuan kompetensi, yang mengurangi minat generasi muda. Meskipun era pascapandemi menuntut kanal digital, kurangnya literasi digital membuat sejumlah pemuda bertanggung jawab atas promosi media sosial, sementara orang lain menjadi konsumen pasif. Jika desa belum mencapai kemitraan penuh menurut model Arnstein, mereka harus menciptakan forum evaluasi terbuka di mana warga dapat menilai pembagian manfaat dan arah pengembangan.

Secara keseluruhan, tantangan ini menunjukkan bahwa intervensi kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan partisipasi agar pengembangan desa wisata lebih inklusif dan berkelanjutan. Hasil ini memiliki dampak pada kebijakan CBT di Indonesia karena menekankan betapa pentingnya komunikasi, akuntabilitas, dan pemberdayaan kelompok rentan untuk mengatasi ketimpangan struktural.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa Wisata Pandansari masih bervariasi dan biasanya terkonsentrasi pada kelompok pelaku inti. Berdasarkan kerangka teori Arnstein, kelompok pengelola inti telah mencapai kolaborasi dengan pemerintah desa dan kabupaten, sedangkan partisipasi warga umum berada pada tingkat informasi dan konsultasi. Ini ditunjukkan oleh pengurus komunitas, tukang tubing, fasilitator outbound, pemuda yang terlibat dalam operasi dan promosi digital, serta pemilik usaha kecil di sekitar lokasi wisata yang aktif. Sebaliknya, sebagian besar warga lainnya hanya menonton atau menerima manfaat secara tidak langsung, tanpa ruang yang jelas untuk membantu, mengawasi, atau terlibat dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, partisipasi mereka belum menjadi pola kolektif seluruh desa.

Jenis partisipasi masyarakat bervariasi menurut fase program, dengan tahap pelaksanaan yang paling kuat dan tahap perencanaan dan evaluasi yang paling lemah. Pada tahap perencanaan, keterlibatan bersifat representatif dan terbatas, di mana gagasan awal dari komunitas lokal disampaikan kepada pemerintah tanpa melibatkan banyak kelompok, seperti

petani, perempuan, atau warga dusun jauh. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan, partisipasi nyata ditunjukkan melalui sumbangan tenaga, waktu, dan keahlian praktis, seperti menjadi operator tubing atau pengelola warung, yang mudah dilakukan karena terkait dengan penghasilan harian. Namun, selama tahap evaluasi, orang hanya dapat berpartisipasi di dalam kantor pengelola dan tidak ada mekanisme terbuka untuk orang-orang di luar struktur kelembagaan. Akibatnya, aspirasi sering datang melalui diskusi informal daripada forum resmi.

Konfigurasi partisipasi yang tidak sepenuhnya inklusif terdiri dari faktor pendukung dan penghambat sehingga saling tarik menarik. Faktor pendukung termasuk kepemimpinan penggagas, potensi alam saluran irigasi, dukungan infrastruktur dari pemerintah kabupaten, peluang ekonomi tambahan, modal sosial gotong royong, dan pengakuan dari luar dan media sosial. Sebaliknya, hal-hal seperti kurangnya pelatihan formal, literasi digital yang buruk, beban kerja ganda bagi perempuan, persepsi ruang ekonomi tertutup, modal finansial yang terbatas, informasi yang tidak merata, dan kurangnya mekanisme evaluasi terbuka menjelaskan mengapa partisipasi masih kurang di kalangan kelompok rentan. Secara teoretis, integrasi kerangka Arnstein dengan Framework Livelihoods yang berkelanjutan menegaskan partisipasi sebagai proses perjanjian kekuasaan dan akses ke aset nafkah daripada hanya kesadaran; ini terkait erat dengan posisi sosial-ekonomi warga.

Untuk meningkatkan basis partisipasi, komunitas penggagas harus memperluas ruang untuk partisipasi dalam perencanaan melalui musyawarah yang inklusif, kanal komunikasi yang transparan, tata kelola ekonomi yang adil, mekanisme evaluasi yang terbuka, dan lingkungan internal yang ramah. Pemerintah desa dan BUMDes harus menjadikan desa wisata sebagai bagian penting dari perencanaan desa, memberikan akses modal yang murah, dan memastikan inklusi gender dan generasi. Pemerintah kabupaten, Dinas Pariwisata, dan pendamping program harus berkonsentrasi pada peningkatan kapasitas sosial, pelatihan berkelanjutan, dan pembentukan jaringan antar desa wisata untuk meningkatkan inklusi. Forum yang ada, program usaha kecil, dan pemanfaatan pemuda sebagai jembatan digital adalah cara masyarakat desa Pandansari dapat menyuarakan kepentingannya. Untuk mengembangkan program ini menuju tata kelola yang adil dan berkelanjutan, pada penelitian lanjutan tentu memerlukan analisis digitalisasi, studi komparatif, analisis dimensi spesifik, dan pendekatan campuran.

DAFTAR REFERENSI

- Abiyad, S. N., Asy'ari, R. A. A. R., Mustofa, A. N. A., & Putra, R. R. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Kelurahan Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. *Journal of Event, Travel and Tour Management*, 4(2), 1–9.
- Annisa, Prastiwi, F., & Dwiputri, N. (2023). Strategi pengembangan desa wisata dalam upaya meningkatkan kemandirian desa. *Panrita Abdi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 7(2). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Astutik, F. (2024). *Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan ekowisata susur Sungai Kejawan Putih Tambak, Kota Surabaya* (Disertasi doktoral, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Budisusila, A., & Handoko, V. S. (2023). Utilitas ragam media digital dan struktur persaingan pasar antar desa wisata di kawasan Perbukitan Menoreh. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 4(1), 26–41.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fathurrahman, V., Agustina, I. H., & Aji, R. R. (2024). Partisipasi masyarakat Desa Jagara dalam pengembangan objek wisata Waduk Darma Kabupaten Kuningan. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, 4(1), 33–40. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v4i1.3608>
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Kandui: Faktor pengaruh dan tantangan. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.1084>
- Hardiani, et al. (2021). *Penerapan tangga partisipasi Arnstein dalam program pembangunan berbasis komunitas di Indonesia*.
- Hariyadi, B. R., Rokhman, A., Rosyadi, S., Yamin, M., & Runtiko, A. G. (2024). The role of community-based tourism in sustainable tourism villages in Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), 1–24.
- Hidayat, M., Depria, M., Wijaya, R., Rozak, A., & Erliyandi, R. (2022). Rancangan 3D pengembangan desa wisata budaya Pandanwangi Cianjur berorientasi nilai ecovillage. *Sosio Religi*, 20(2), 120. <https://ejournal.upi.edu/index.php/SosioReligi/article/view/57701>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kemendesa PDTT.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Kemendesa PDTT. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/271247/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2023>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Pedoman pengembangan desa wisata dan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal*. Kemenparekraf.
- Kulandima, R. U. L., & Lasso, A. H. (2023). Partisipasi masyarakat Desa Tuafanu dalam pembangunan pariwisata Pantai Oetune, Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*, 17(1), 119–131. <https://doi.org/10.47608/jki.v17i1.2023.119-131>
- Kusumastuti, H., Pranita, D., Viendyasari, M., Rasul, M. S., & Sarjana, S. (2024). Leveraging local value in a post-smart tourism village to encourage sustainable tourism. *Sustainability*, 16(2), 873. <https://doi.org/10.3390/su16020873>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muda. (2025). *Systematic review partisipasi masyarakat dalam pariwisata berkelanjutan di Indonesia periode 2018–2025*.
- Pangestu, E. R., Herawati, N. R., & Marlina, N. (2025). Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di desa wisata untuk mewujudkan community-based tourism (CBT). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 642–662.
- Prayudhi, L. A., Zamrodah, Y., & Suryanto, T. L. M. (2024). Pemberdayaan Pokdarwis Dewatapuro dalam pengembangan desa wisata pesisir di Ngadipuro Kabupaten Blitar. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 2080–2091.
- Raharjo, D., & Wirahayu, Y. A. (2025). Analisis penerapan community-based tourism pada wisata Kampung Keramik Dinoyo Kota Malang. *Jurnal ALTASIA*, 7(1), 121–133.
- Rasyid Ohorella, N., & Prihantoro, E. (2021). Pengembangan branding pariwisata Maluku berbasis kearifan lokal. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 89–99. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol16.iss1.art7>
- Rasyid, M. F., & Adnan, M. (2025). Pemuda dan tata kelola Desa Wisata Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 722–736.

- Rochman, G. P., Akliyah, L. S., & Burhanuddin, H. (2022). Digitalisasi desa di Desa Cikole Lembang. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 181–197. <https://doi.org/10.35906/resona.v5i2.806>
- Saleh Lutuhrean, B. (2019). *Strategi bisnis pariwisata* (1st ed.). Humaniora.
- Salim, I. (2025). Tantangan desa wisata dalam pemberdayaan masyarakat: Studi kasus Desa Wisata Tanjung, Kelurahan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. *Journal Publicuho*, 8(1), 540–554.
- Sari, D., Setiawan, A., & Fitriani, R. (2021). Peran partisipasi dalam pemberdayaan ekowisata Bali. *Jurnal Lingkungan dan Pariwisata*, 14(1), 120–140.
- Silalahi, B., & Rut, S. (2024). *Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes Desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun*.
- Suhaimi, N., Putri, A., Harahap, A., & Furqan, A. (2024). Analisis penerapan community-based tourism (CBT) di Desa Wisata Mekarsari Kabupaten Bandung. *Jurnal Industri Pariwisata*, 6(2).
- Suyatna, H., Indroyono, P., Yuda, T. K., & Firdaus, R. S. M. (2024). How community-based tourism improves community welfare? A practical case study of “Governing the Commons” in rural Nglanggeran, Indonesia. *International Journal of Community and Social Development*, 6(1), 77–96. <https://doi.org/10.1177/25166026231189946>
- Widaningsih, N., Dona, T., Triyana, R., Widagdo, D., Rahmafitria, F., & Pratama, R. (2024). Konsep pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan Desa Wisata Nglanggeran. *Jurnal Pariwisata*, 7(1).
- Widayati, A., Winanta, A., Widada, H., & Pratiwi, N. H. (2024). Initiating a sustainable community-based agritourism model of herbal garden in a rural area of Indonesia: Perspectives from community members. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2347049. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2347049>
- Widodo, S., & Setiawan, A. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan desa wisata Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Desa*, 8(2), 100–118.